



Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram

Abdurrahman¹, M. Taufik Rachman², Dara Puspita Ayu³

¹Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

²Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

³Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 10-08-2019

Disetujui: 25-08-2019

Kata Kunci:

1. Strategi
2. Pengendalian
3. Pertumbuhan
4. Penduduk
5. Kota Mataram

ABSTRAK

Abstrak: Diera globalisasi ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk di Negara berkembang sangat berdampak pada peningkatan angka pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan mengakibatkan resiko kemiskinan yang tinggi, negara yang laju pertumbuhan penduduknya memiliki peraturan yang menekan jumlah angka kelahiran, peraturan ini diharapkan agar bisa memperlambat angka kelahiran yang tidak terkontrol. Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan kurang seimbangnya struktur umur penduduk di beberapa daerah menjadi masalah pokok yang dihadapi dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana tingkat pertumbuhan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pertama mengumpulkan data hingga penelitian ini berakhir dan melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan. Selanjutnya penafsiran data dilakukan sesuai dengan tujuan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan sesuai tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan pengendalian laju pertumbuhan penduduk di kota mataram sudah berjalan cukup efektif walaupun masih terdapat hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan strategi atau program yang dilaksanakan. Strategi yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu 1. Analisis The Growth Strategy, Program yang dilakukan yaitu kegiatan Pembentukan dan Peresmian Kampung Keluarga Berencana, 2. Analisis The Welfare Strategy, Program yang dilakukan yaitu menumbuhkan serta meningkatkan kepedulian masyarakat dalam rangka penyuluhan dan pengerakan keluarga Berencana dan melakukan pelayanan menggunakan mobil pelayanan KB, 3. Analisis The Responsitive Strategy, Program yang dilakukanyaitu sosialisasi penggerakan masyarakat peduli KB berkualitas, 4. Analisis The Integrated and Holistic Strategy, Program yang dilakukan yaitu kegiatan Pembinaan Kader KB se Kota Mataram. Dari 4 strategi diatas maka yang sangat relevan untuk laju pertumbuhan penduduk yaitu analisis the Growth Strategy. Faktor pendorong Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pelaksanaan Pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Mataram yaitu dengan adanya undang-undang dan peraturan walikota Mataram yang bisa menjadi pendorong dalam berjalannya setiap program yang telah dibuat oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sedangkan faktor penghambatnya yaitu dengan banyaknya masalah dan hal-hal yang bisa

menghambat kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk Kota Mataram.

Abstract

In the era of globalization marked by the rate of population growth in developing countries greatly affects the increase in population growth rates which are very rapid and lead to high risk of poverty, countries with population growth have regulations that reduce the number of births, this regulation is expected to slow birth rates controlled. The still high level of population growth and the imbalance in the age structure of the population in some regions are the main problems faced in the field of population and family planning growth rates.

Keywords:

1. Strategy
2. Control
3. Growth
4. Population
5. City of Mataram

The research method uses a descriptive approach with a qualitative approach. With the method of observation, interviews and documentation. First, collect data until this research ends and do a question and answer directly with the informant. Furthermore, the interpretation of data is carried out in accordance with the theoretical objectives related to the research problems and according to the research objectives.

The results of the study show that the implementation of the Office of Population and Family Planning Control strategy in the implementation of controlling the rate of population growth in the city of Mataram has been running quite effectively even though there are still obstacles that occur in the implementation of strategies or programs implemented. The strategy carried out by the Population and Family Planning Control Office is 1. Analysis of The Growth Strategy, the program that is carried out is the Formation and Inauguration of Family Planning Villages, 2. Analysis of The Welfare Strategy, the program that is carried out is to grow and increase community awareness in the context of counseling and family planning and service using family planning services, 3. Analysis of the Responsitive Strategy, the program that was carried out was the socialization of community mobilization to care about quality FP, 4. Analysis of the Integrated and Holistic Strategy, the program carried out was the KB Cadre Development activities in Mataram City. From the 4 strategies above, it is very relevant for the population growth rate, namely the analysis of the Growth Strategy. The driving factor of the Population and Family Planning Control Office in the Implementation of Population Growth Control in the City of Mataram is the existence of the mayor's laws and regulations which can be a driving force in the course of every program that has been made by the Population and Family Planning Control Agency, while the inhibiting factors are with a lot of problems and things that can hinder the policies or strategies carried out by the Population and Family Planning Control Agency that can affect the growth of the population of Mataram city.

◆

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat nomor empat di dunia. Komposisi etnis di Indonesia amat bervariasi karena negeri ini memiliki ratusan

ragam suku dan budaya. Meskipun demikian, lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh dua suku terbesar. Bagian ini membahas struktur dan ciri khas penduduk Indonesia. Dua suku terbesar ini adalah Jawa (41 persen dari total populasi) dan suku Sunda (15 persen dari total populasi). Kedua suku ini berasal dari pulau Jawa, pulau dengan penduduk terbanyak di Indonesia yang mencakup sekitar enam puluh persen dari total populasi Indonesia. Jika digabungkan dengan pulau Sumatra, jumlahnya menjadi 80 persen total populasi. Ini adalah indikasi bahwa konsentrasi populasi terpenting berada di wilayah barat Indonesia. Propinsi paling padat adalah Jawa Barat (lebih dari 43 juta penduduk), sementara populasi paling lengang adalah propinsi Papua Barat di wilayah Indonesia Timur (dengan populasi hanya sekitar 761,000 jiwa).

Diera globalisasi ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk di Negara berkembang sangat berdampak pada peningkatan angka pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan mengakibatkan resiko kemiskinan yang tinggi, negara yang laju pertumbuhan penduduknya memiliki peraturan yang menekan jumlah angka kelahiran, peraturan ini diharapkan agar bisa memperlambat angka kelahiran yang tidak terkontrol. Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan kurang seimbangnya struktur umur penduduk di beberapa daerah menjadi masalah pokok yang dihadapi dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana tingkat pertumbuhan.

Menurut proyeksi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menilik populasi absolut Indonesia di masa depan, maka negeri ini akan memiliki penduduk lebih dari 270 juta jiwa pada tahun 2025, lebih dari 285 juta jiwa pada tahun 2035 dan 290 juta jiwa pada tahun 2045. Baru setelah 2050 populasi Indonesia akan berkurang. Sejak 40 tahun yang lalu Indonesia sedang mengalami sebuah proses urbanisasi yang pesat makanya sekarang sedikit lebih dari setengah jumlah total penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Proses ini menunjukkan perkembangan positif bagi ekonomi Indonesia karena urbanisasi dan industrialisasi akan membuat tumbuhnya ekonomi lebih maju dan menjadikan Indonesia negeri dengan tingkat pendapatan menengah ke atas.

Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 ini mencapai 261 juta jiwa. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kepadatan penduduk paling tinggi di Indonesia.

Jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 48 juta jiwa atau 18,34 persen dari total populasi Indonesia. Jawa Timur dan Jawa Tengah berada di urutan dua dan tiga, masing-masing dengan 39 dan 34 juta jiwa. Di peringkat 6, bertengger DKI Jakarta dengan jumlah penduduk 10 juta lebih. Sementara itu, Papua Barat adalah provinsi paling sedikit penduduknya, yakni sebanyak 900 ribu lebih. Proyeksi ini juga memperkirakan populasi Indonesia pada 2035 akan mencapai 305 juta jiwa. Populasi masih terkonsentrasi di Jawa tetapi sedikit menurun. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan. Menurut kelompok umur, penduduk yang masih tergolong anak-anak (0-14 tahun) mencapai 70,49 juta jiwa atau sekitar 26,6% dari total populasi. Untuk populasi yang masuk kategori usia produktif (14-64 tahun) 179,13 juta jiwa (67,6%) dan penduduk usia lanjut 65 ke atas sebanyak 85,89 juta jiwa (5,8%). Dari proyeksi tersebut, jumlah kelahiran pada tahun ini mencapai 4,81 juta jiwa sedangkan jumlah kematian 1,72 juta jiwa. Adapun rasio angka ketergantungan (usia produktif terhadap usia nonproduktif) sebesar 47,9%, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 48,1% dan juga turun dari posisi 2010 yang mencapai 50,5%.

Adapun masalah-masalah kependudukan yang dialami oleh Indonesia seperti dilansir (Bps.go.id) antara lain:

1. Besarnya Jumlah Penduduk (Over Population).

Telah disebutkan sebelumnya di awal bahwa jumlah penduduk Indonesia berada di urutan ke empat terbesar di dunia setelah berturut-turut China, India, Amerika Serikat dan keempat adalah Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia dari hasil Sensus 2010 mencapai angka 237.641.326. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Dari sensus tahun 1971-2010, jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah.

2. Tingginya Tingkat Pertumbuhan Penduduk.

Terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi tentunya terdapat faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduk. Penduduk yang relative tinggi disebabkan masih tingginya tingkat kelahiran dan lebih cepatnya penurunan kematian, hal tersebutlah yang menyebabkan jumlah penduduk Indonesia meningkat dengan pesat. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan oleh berbagai alasan, disamping struktur umur yang kurang seimbang serta angka kelahiran

yang tinggi, masalah lainnya adalah penyebaran penduduk yang kurang merata dan migrasi atau perpindahan penduduk.

3. Persebaran Penduduk Tidak Merata.

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk disuatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per km kuadrat. Berdasarkan sensus penduduk dan survey penduduk, persebaran penduduk Indonesia antar provinsi yang satu dengan provinsi yang lain tidak merata. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbesar di duniat tingkat pertumbuhan penduduknya juga tinggi. Sebenarnya jumlah penduduk yang besar bukanlah suatu masalah, sebab apabila semua penduduknya memiliki kualitas SDM yang baik maka justru akan memberikan kontribusi kepada negara.

Pertumbuhan penduduk dipahami sebagai perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Pengertian lainnya adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk adalah sebuah upaya untuk menekankan kelahiran manusia guna menciptakan masyarakat yang selaras dengan daya tampung alam.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 ayat 2 Menjelaskan Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Seperti kita ketahui masalah penduduk sudah menjadi perhatian manusia sejak dahulukala para negarawan maupun kelompok ahli sudah sering memperbincangkan tentang besarnya jumlah penduduk yang dikehendaki dan usaha yang bagaimana untuk merangsang maupun memperlambat pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan penduduk sebenarnya merupakan keseimbangan dinamis antara dua kekuatan yang menambah atau yang mengurangi jumlah penduduk. Perkembangan penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang dapat terjadi pada semua golongan umur. Dalam konteks spasial mobilitas penduduk juga berpengaruh terhadap perubahan dalam jumlah

penduduk, dimana imigrasi akan menambah jumlah penduduk dan emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar bagi beberapa kalangan merupakan suatu hal positif karena dengan jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan, perekonomian akan berkembang bila jumlah tenaga kerjanya banyak.

Namun disisi lain beberapa kalangan justru meragukan apakah jumlah penduduk yang besar adalah sebagai asset seperti yang dijelaskan sebelumnya, akan tetapi kebalikan dari hal tersebut bahwa penduduk merupakan beban bagi pembangunan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin lama semakin banyak pula seiring dengan perkembangan jumlah penduduk tersebut. Pandangan pesimis seperti ini di dukung oleh teori Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk menurut deret ukur sementara pertumbuhan bahan makanan menurut deret hitung.

Simpulan dari pandangan pesimis ini adalah bukan kesejahteraan yang didapat tapi justru kemelaratan akan di temui bilamana jumlah penduduk tidak dikendalikan dengan baik. Sebenarnya permasalahan yang muncul dibidang kependudukan bukan hanyapada jumlah yang besar semata akan tetapi juga berimbas pada turunan dari kuantitas yang besar tersebut antara lain adalah persebaran penduduk, kualitas penduduk, kecukupan dari sisi konsumsi, struktur penduduk yang sebagian besar masih muda, modal dan teknologi yang dimiliki juga masih rendah dan akibatnya produktivitas kerja makin menurun serta masalah krusial yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Pengelola pelaksana Program Keluarga Berencana memerlukan penanganan yang serius juga strategi yang tepat. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk merupakan kunci keberhasilan yang dilakukan melalui peningkatan jumlah cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) dan KB mandiri.

Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Mataram Tahun 2011 – 2020



Kependudukan Berdasarkan data yang ada di BPS tahun 2016, jumlah penduduk Kota Mataram tercatat 459.314 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap

jumlah penduduk perempuan), sebesar 98 persen. Permasalahan Penduduk Mataram belum menyebar secara merata di seluruh wilayah Mataram. Umumnya, penduduk banyak menumpuk di kecamatan Ampenan. Secara rata-rata, kepadatan penduduk Mataram. Tercatat sebesar 7.493 jiwa setiap kilometer persegi, dan wilayah terpadat yaitu kecamatan Ampenan yang memiliki tingkat kepadatan 9.453 orang setiap kilometer persegi. Permasalahan kependudukan kota Mataram akan terus meningkat dan membuat laju penduduk semakin padat. Adapun masalah kependudukan yang dihadapi kota Mataram seperti dilansir (Mataram.go.id) yaitu Meningkatnya angka kelahiran dan kehamilan, tingginya angka perkawinan usia muda yang tidak terencana, serta angka mobilitas yang tinggi.

Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana Pemerintah kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Mataram. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB terus melakukan gerakan-gerakan nyata agar pertumbuhan penduduk tetap seimbang sepanjang tahun 2017, BKKBN bekerjasama dengan TP PKK Provinsi NTB menggelar roadshow ke 10 kabupaten dan kota di Provinsi NTB untuk bersama-sama mendorong program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP). Dengan harapan terciptanya keluarga kecil yang berkualitas. Meski angka kelahiran di NTB belakangan ini terjadi penurunan, BKKBN baru bisa menargetkan tahun 2025 ke depan laju pertumbuhan penduduk di NTB mulai seimbang dan mendekati angka 2,1 per wanita usia subur (WUS).

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pada pasal 2 (dua) disebutkan bahwa “BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana”. Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera disebutkan bahwa “Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga serta peningkatan kesejahteraan

keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera”.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan jumlah penduduk. Maka suatu daerah harus memberi pandangan yang bagus bagi masyarakat, guna untuk meningkatkan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat terkait tentang pengendalian pertumbuhan penduduk, agar disuatu daerah itu menjadi daerah yang mempunyai pengendalian pertumbuhan penduduk yang bagus dan berkualitas serta membuat sosialisasi program Keluarga Berencana (KB), Keluarga Sejahtera (KS) dan memberikan pemahaman pada masyarakat dari sisi kesehatan baik kesehatan reproduksi bagi ibu serta keberlangsungan hidup ibu dan bayi yang berdampak signifikan terhadap laju pertumbuhan penduduk kota Mataram. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik mengambil judul skripsi dengan judul Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram.

Tinjauan Pustaka

Strategi berasal dari bahasa Yunani "*strategia*" yang diartikan sebagai "*the art of the general*" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Konsep ini relevan dengan situasi jaman dulu yang sering diwarnai perang, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Pada awalnya kata strategi dipergunakan untuk kepentingan militer saja tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti strategi bisnis, olahraga (misalnya sepak bola dan tenis), catur, ekonomi, pemasaran, perdagangan, manajemen strategi, dan lain-lain. Stoner, Freeman dan Gilbert Jr (1995), mengatakan konsep strategi didefinisikan berdasarkan dua perspektif berbeda yaitu :

- a. apa yang pemerintah ingin lakukan
- b. apa yang pemerintah harus lakukan

Berdasarkan perspektif yang pertama, strategi sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan pemerintah dan mengimplmentasikan misinya. Makna yang terkandung dari strategi ini adalah bahwa pemerintah memainkan peran yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi. Sedangkan pada perspektif kedua, strategi sebagai pola tanggapan atau respon pemerintah terhadap lingkungannya sepanjang waktu.

Menurut David (2008,8), Semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area

fungsional. Tidak ada perusahaan yang sama kuatnya atau lemahnya dalam semua area bisnis. Kekuatan atau kelemahan internal, digabungkan dengan peluang atau ancaman dari eksternal dan pernyataan misi yang jelas, menjadi dasar untuk penetapan tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi ditetapkan dengan maksud memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan.

a. Strategi Pemberdayaan

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Secara umum, ada empat strategi pengembangan masyarakat yaitu:

a. The Growth Strategy

Penerapan strategi pertumbuhan ini pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekosistem, melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktifitas, pertanian, permodalan, dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat terutama di pedesaan.

b. The Welfare Strategy

Strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dibarengi dengan pembangunan kultur dan budaya mandiri dalam arti masyarakat maka yang terjadi adalah sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu dalam setiap usaha pengembangan masyarakat salah satu aspek yang harus diperhatikan penanganannya adalah masalah kultur dan budaya masyarakat. Pembangunan budaya jangan sampai kontraproduksi dengan pembangunan ekonomi. Dalam konteks yang sedemikian inilah dakwah dengan model pengembangan atau pemberdayaan masyarakat menjadi sangat relevan karena salah satu tujuannya adalah mengupayakan budaya mandiri masyarakat.

c. The Responsitive Strategy

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksud untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan sendiri dengan bantuan pihak luar (self need and assistance) untuk memperlancar usaha sendiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan

d. The Integrated or Holistic Strategy

Untuk mengatasi delima pemberdayaan masyarakat karena kegagalan dari ketiga strategi yang dijelaskan di atas, maka konsep kombinasi dari unsur-unsur pokok ketiga strategi di atas menjadi alternative strategi pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, legislatif, para

pelaku ekonomi, rakyat, lembaga-lembaga pendidikan serta organisasi-organisasi non pemerintah. Cara kerja yang langsungberhubungan dengan masyarakat dilapis bawah memberikan peluang yang luas untuk menggerakkan dan melancarkan proses belajar masyarakat dalam membangun kehidupannya melalui kerja-kerja konkrit dan melalui uji coba-uji coba dalam skala mikro, kecil dan menengah. Dalam kaitan ini fasilitator pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dan strategis. Fasilitator bukanlah pekerja ansih yang bekerja dengan model “tukang” tetapi mereka adalah aktivis yang bekerja penuh komitmen dan kreativitas serta memiliki semangat tinggi membantu masyarakat belajar membebasakan dirinya dari segala bentuk dominasi yang memiskinkan dan membodohkan.

b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib, berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa urusan penyelenggaraan pengendalian penduduk dan keluarga berencana termasuk urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan penyelenggaraan dilaksanakan secara konkuren yakni menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Namun dalam Undang-undang tersebut ditetapkan 4 (empat) sub urusan yang menjadi kewenangan bersama yaitu :

1. Pengendalian Penduduk
2. Keluarga Berencana
3. Keluarga Sejahtera
4. Standarisasi Pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB).

Keluarga Berencana menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui:

- a. Pendewasaan usia perkawinan.
- b. Pengaturan kelahiran.
- c. Pembinaan ketahanan keluarga.
- d. Peningkatan kesejahteraan Keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Oleh karena itu Program KB Nasional ini berkaitan langsung dengan upaya pengaturan perkembangan jumlah penduduk yang seharusnya merupakan satu kesatuan sistem dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan menghormati kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom, panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah

Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan kewenangannya melaksanakan urusan pemerintah bidang KB & KS, khususnya pengembangan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah KB Kabupaten/Kota yang akan menjadi pelaksanaannya..

c. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Menurut Glen A. Welsch, Hilton dan Gordon yang diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw (2000:3) pengendalian adalah suatu proses untuk menjamin terciptanya kinerja yang efisien yang memungkinkan terciptanya tujuan perusahaan. Dengan kata lain mengatur laju atau mengontrol jalannya suatu tindakan agar dapat berjalan dengan sistematis dan efisien. Salah satu jenis pengendalian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menanggulangi masalah pertumbuhan penduduk ini yaitu pengendalian sosial dimana yang artinya adalah suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu di bandingkan pada waktu sebelumnya yang disebabkan perubahan fertilitas, mortalitas dan migrasi.

Dimulai dengan tulisan Confucius sekitar tahun 500 BC yang menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat dapat menekan standar hidup masyarakat karena dapat mengurangi pendapatan pekerja. Dianjurkan adanya hubungan optimal antara penduduk dan tanah pertanian secara proposional yang optimal selalu dapat dipertahankan. Teori Cina kuno menyatakan bahwa:

- Tingkat kematian akan naik apabila persediaan makanan tidak cukup.
- Perkawinan pada usia dini akan menyebabkan tingkat kematian yang semakin tinggi.
- Peperangan dapat memperlambat pertumbuhan penduduk
- Upacara perkawinan yang mewah dan mahal akan menurunkan tingkat perkawinan

Menurut Thomas Robert Malthus (1766 – 1844)

- Bahan makanan dibutuhkan untuk hidup.
- Nafsu antara pria dan wanita dibutuhkan dan akan tetap keadaannya seperti itu.
- Apabila tidak ada hambatan penduduk akan bertambah menurut deret ukur dan bahan makanan akan bertambah menurut deret hitung.

d. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram, melalui 4 strategi yaitu Growth Strategy, Welfare Strategy, Responsive Strategy, Integrated or Holistic Strategy.

Menganalisis tentang faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pengendalian laju pertumbuhan penduduk Kota Mataram.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016: 8) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Waktu yang dibutuhkan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu selama 3 bulan. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data yang akurat (Moleong, 2007: 128). Lokasi dalam penelitian ini berada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terdapat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang berlokasi di kota Mataram. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena ketersediaan data yang dibutuhkan, dekat dengan lokasi tempat tinggal dan peneliti ingin mengetahui sejauh mana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan pengendalian laju pertumbuhan penduduk kota Mataram.

Pemilihan informasi sebagai sumberdata dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah pegawai atau bagian bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga

berencana dalam pelaksanaan pengendalian laju pertumbuhan penduduk kota Mataram.

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampilng*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjajahi obyek atau situasi yang diteliti Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci (*key infoman*) yang tepat dalam memberikan informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai Dinas Pengendalian Penduduk Perempuan dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan pengendalian laju pertumbuhan penduduk Kota Mataram adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Pegawai/Anggota
3. Stakeholder
4. Masyarakat

Dalam pelaksanaan penelitian memerlukan data yang akurat agar hasil kajian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam melaksanakan penelitian ada 2 (dua) jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

- a) Data kualitatif adalah jenis data yang merupakan data yang melihat suatu fakta dengan gejala dari kualitas yang dideskripsikan suatu sistematis analisis dan logis.
- b) Data kuantitatif adalah suatu data yang dapat menggambarkan suatu permasalahan dan gejala dari sifat kuantitas dan pada jenis data seperti ini diperlukan pengujian statistik.

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, karena dalam penelitian ini akan memperjelaskan dan mendeskripsikan informasi-informasi yang dikumpulkan dari informan yaitu data yang berbentuk kalimat, skema dan gambar pada objek.

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:

- a). Data primer

adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan. Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- b). Data sekunder

yaitu berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari, internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil atau menggunakannya sebagian/seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat atau dilaporkan.

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) atas kehandalan (*reabilitas*). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Menurut Moleong (2007:324), terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data antara lain:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Fungsi derajat kepercayaan yaitu, *Pertama*, penemuannya dapat dicapai; *Kedua*, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:

Triangulasi

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan. Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tiga macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukan dengan cara:

- (a) Mengajukan berbagai variasi pertanyaan
- (b) Membandingkan data hasil pengamatan (*observasi*) dengan wawancara
- (c) Mengeceknnya dengan berbagai sumber data
- (d) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan data dapat dilakukan.

Berdasarkan hasil triangulasi tersebut, maka akan sampai pada salah satu kemungkinan yaitu apakah data yang diperoleh ternyata konsisten, tidak konsisten, atau berlawanan. Selanjutnya mengungkapkan gambaran yang lebih memadai mengenai gejala yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Mataram.

Menjalankan sebuah organisasi dengan sebuah tujuan, maka tidak lepas dari memikirkan

strategi–strategi untuk memajukan organisasi tersebut dalam pencapaian tujuan organisasi. Strategi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat dari potensi yang dimiliki untuk dikembangkan sehingga pertumbuhan penduduk kota Mataram dapat dikendalikan. Kebijakan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sesuai dengan data yang diperoleh, diketahui bahwa kebijakan yang diambil adalah dengan penerapan program Keluarga Berencana (KB) selain penerapan program keluarga berencana, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga memuat strategi yaitu:

Melihat kebijakan Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki kebijakan tersendiri tetapi harus berdasarkan kebijakan dari pusat salah satunya di Kota Mataram.

Salah satu cara untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi apakah mereka berhasil atau tidak yaitu dengan menilai hasil kerja mereka dalam menjalankan tugas yang mereka miliki tidak terkecuali Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram.

Berdasarkan fokus penelitian maka strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, peneliti menggunakan analisis strategi sebagai berikut.

a. Analisis The Growth Strategy

Dalam upaya penguatan program KKBPK 2015-2019, Presiden Republik Indonesia mengamanatkan BKKBN agar dapat menyusun suatu kegiatan/program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana 2015-2019, dapat menjadi ikon BKKBN serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN segera dapat membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB). Kampung Keluarga Berencana menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program KKBPK secara utuh di lini lapangan. Kampung Keluarga Berencana merupakan salah satu bentuk/model miniature pelaksanaan total program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai persyaratan

penentuan lokasi Kampung Keluarga Berencana) di seluruh kabupaten/kota.

Kampung Keluarga Berencana adalah salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program Keluarga Berencana, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kampung KB juga merupakan miniatur pembangunan nasional yang paling kecil di tingkat kelurahan. Kampung KB merupakan miniatur pembangunan nasional yang apabila ada masalah akan didiskusikan oleh UPTD yang ada sehingga permasalahan dapat diatasi, kampung KB sudah dicanangkan secara nasional tahun 2016 oleh presiden kita yang sekarang dan dicanangkan di wilayah Jawa Barat yaitu di kampung KB Mertasinga kecamatan Gunung Jati kabupaten Cirebon provinsi Jawa Barat, sedangkan di Kota Mataram sudah dicanangkan oleh wali Kota Mataram pada bulan Maret tahun 2016 yaitu di kampung KB Geguntur kelurahan Jempong Baru kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan kampung KB di Kota Mataram sudah terbentuk 18 kampung KB dari tahun 2016 dan harapan kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kedepannya penduduk Kota Mataram dapat diatasi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

1) Kampung KB

Jumlah Kelompok Kegiatan Kampung KB di Kota Mataram sebanyak 12 Kelompok yang berada di masing-masing kecamatan, yaitu :

- Kecamatan Sekarbela (Kampung KB Geguntur)
- Kecamatan Ampenan (Kampung KB Pejerk Abian)
- Kecamatan Selaparang (Kampung KB Karang Baru)
- Kecamatan Mataram (Kampung KB Timbrah)
- Kecamatan Cakranegara (Kampung KB Karang Kuluh)
- Kecamatan Sandubaya (Kampung KB Bertais Daye)

2) Hasil pelayanan peserta KB baru

a. Peserta KB Baru 2017

Pencapaian peserta KB Baru bulan Desember 2017 sebanyak 730 Peserta atau 7.47 % dari Perkiraan Permintaan Masyarakat Peserta KB Baru (PPM PB) sebanyak 9.766 Peserta. Apabila di lihat per metode kontrasepsi maka persentasenya adalah sebagai berikut : IUD : 182 (24,93%) Peserta, MOW : 14 (1,92 %) Peserta, MOP : 5 (0,68%) Peserta, Kondom :

23 (3,15 %), Implant : 121 (16,58 %) Peserta, Suntikan : 325 (44,52 %) Peserta dan PIL : 60 (8,22 %) Peserta.

Apabila dilihat dari pencapaian peserta KB Baru per kecamatan pada bulan DESEMBER 2017, terdapat kecamatan dengan pencapaian PB terhadap PPM di atas persentase Kota (7,47 %) yaitu Kecamatan Sekarbela (11,72 %), Kecamatan Mataram (7,98 %) dan Kecamatan Selaparang (7,87 %).

Pencapaian komulatif peserta KB Baru Sampai dengan bulan DESEMBER 2017 tercatat 9.853 Peserta atau 100,89 % dari PPM PB sebanyak 9.766 Peserta. Apabila dilihat per metode kontrasepsi, maka persentase pencapaian peserta KB Baru komulatif adalah sebagai berikut :

IUD : 2.592 (26,31 %) Peserta, MOW : 187 (1,90 %) Peserta, MOP : 5 (0,05%) Peserta Kondom : 281 (2,85 %), Implant : 1.640 (16,64 %) Peserta, Suntikan : 4.319 (43,83 %) Peserta, dan Pil : 829 (8,41 %) Peserta.

Berdasarkan tingkat pencapaian peserta KB Baru per kecamatan sampai dengan bulan DESEMBER 2017, Pencapaian KB per kecamatan yang tertinggi persentasenya adalah kecamatan Sekarbela 1.901 Peserta (154,68 %) dan yang terendah adalah Kecamatan Selaparang 1.330 Peserta (83,02 %). Lihat Lampiran Tabel 4.7

b. Peserta KB Baru 2018

Pencapaian peserta KB Baru bulan Desember 2018 sebanyak 734 Peserta atau 7,04 % dari Perkiraan Permintaan Masyarakat Peserta KB Baru (PPM PB) sebanyak 10,433 Peserta. Apabila di lihat per metode kontrasepsi maka persentasenya adalah sebagai berikut :IUD : 193 (26,29 %) Peserta, MOW : 20 (2,72%) Peserta, MOP :0 (0,00%) Peserta, Kondom : 23 (3,15 %), Implant : 134 (18,26 %) Peserta, Suntikan : 306 (41,69%) Peserta dan PIL : 58(7,90%) Peserta.

Apabila dilihat dari pencapaian peserta KB Baru per kecamatan pada bulan Desember2018, terdapat kecamatan dengan pencapaian PB terhadap PPM di atas persentase Kota (7,04 %) yaitu Kecamatan Sekarbela (12,59%) dan Kecamatan Mataram (8,39%).

Pencapaian komulatif peserta KB Baru Sampai dengan bulan Desember 2018 tercatat 8.881 Peserta atau 85,12% dari PPM PB sebanyak 10,433 Peserta. Apabila dilihat per metode kontrasepsi, maka persentase pencapaian

peserta KB Baru komulatif adalah sebagai berikut :

IUD : 1.808 (20,36%) Peserta, MOW : 245 (2,76%) Peserta, MOP : 1 (0,01%) Peserta, Kondom : 335 (4,00%), Implant : 1.469 (16,59%) Peserta, Suntikan : 4.166 (46,91%) Peserta dan PIL : 837 (9,42%) Peserta.

Berdasarkan tingkat pencapaian peserta KB Baru per kecamatan sampai dengan bulan Desember 2018, Pencapaian PB per kecamatan yang tertinggi persentasenya adalah kecamatan Sekarbela 1.763 Peserta (137,84) dan Kecamatan Mataram 1.770Peserta (96,46%) dan yang terendah adalah Kecamatan Sandubaya 1.021 Peserta (57,49%).

Dari tahun 2017 sampai tahun 2018 peserta KB semakin meningkat dengan meningkatnya peserta KB maka program yang sudah dijalankan oleh Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana sudah berjalan dengan baik dan bisa menurunkan Total Fertility Rate (TFR) atau angka kesuburan perempuan yang ditargetkan oleh nasional sebesar 2,4 menjadi 1,93% pada tahun 2018 dan meningkatkan Contraceptive Prevalence Rate atau angka pemakaian kontrasepsi pada masyarakat menjadi 77% pada tahun 2018.

Dinas Kependudukan Kota Mataram mengeluarkan program baru yang bisa menekan laju pertumbuhan penduduk dan memberikan pengarahan serta sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya KB khususnya yang sudah menikah tetapi kita juga mempunyai kendala yaitu dengan kurangnya SDM dan masih minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya berKB.

Hal ini sejalan dengan strategi operasional yang dibangun oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana seperti:

- a. Peningkatan kapasitas system pelayanan program PP dan KB
- b. Peningkatan kualitas dan prioritas program
- c. Penggalangan dan pemantapan komitmen
- d. Dukungan regulasi dan kebijakan
- e. Pemantauan, Evaluasi dan Akuntabilitas pelayanan

Disamping itu juga arah kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu:

- a. Menata kembali program dan kelembagaan KB

- b. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun Keluarga Kecil Berkualitas
- c. Menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga serta akses dan kualitas pelayanan KB/KR
- d. Meningkatkan promosi, perlindungan dan upaya perwujudan hak-hak reproduksi
- e. Memberikan fasilitas dalam penyediaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro bagi pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan keluarga miskin
- f. Meningkatkan perencanaan kehamilan dan mencegah kehamilan yang belum diinginkan
- g. Meningkatkan kesehatan perempuan dan anak
- h. Meningkatkan akses dan kualitas informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja, termasuk pencegahan HIV/AIDS dan Narkoba
- i. Meningkatkan kelembagaan dan jejaring pelayanan KB
- j. Mengembangkan dan memantapkan ketahanan keluarga
- k. Mengembangkan dan memantapkan pemberdayaan keluarga

b. Analisis The Welfare strategy

Dalam hal ini dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana lebih memfokuskan usia pernikahan, Pengaturan kelahiran dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Program yang dilakukan yaitu dengan Menumbuhkan serta meningkatkan kepedulian masyarakat dalam rangka penyuluhan dan pergerakan keluarga Berencana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki batas umur dalam pendewasaan yaitu umur 25 untuk pria dan 20-21 untuk wanita.

Penyebab penambahan penduduk karna adanya imigrasi yang datang ke kota, kematian dan kelahiran. Peran DPPKB dalam faktor kelahiran yaitu mengatur kelahiran dengan program KKBPK agar bisa mengatur dan mengukur kelahiran serta mengatur SDM agar lebih berkualitas dan kuantitas. Jarak kelahiran anak minimal 3 tahun dan minimal umur 20 tahun hamil untuk wanita dari segi kesehatan serta usia perkawinan untuk wanita yaitu 20-21 tahun sedangkan untuk pria yaitu umur 25 tahun. Selain melaksanakan program KKBPK, Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga mengatur TPR dan mengedukasi masyarakat berkaitan dengan migrasi penduduk.

Selain kelahiran, imigrasi juga menjadi faktor utama dalam meledaknya jumlah penduduk kota mataram yang dimana banyak orang yang berpindah kekota mataram mencari keberuntungan dan pekerjaan. Dalam hal ini kebijakan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) agar menekan pertumbuhan penduduk melalui edukasi kemasyarakat, tokoh agama, kantor-kantor bahwa penduduk yang terlalu banyak dapat memicu meledaknya jumlah penduduk dan membuat kota mataram semakin padat dan merugikan pemerintah kota mataram dengan meningkatkan jumlah pengangguran. Untuk menyikapi masalah pernikahan dini, imigrasi, kematian dan kelahiran yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pertumbuhan penduduk, beberapa cara yang dilakukan yaitu:

- a. Melaksanakan pelayanan KB
- b. Melakukan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi), PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) kepada remaja agar bisa merencanakan masa depannya.

Mengatur jarak kelahiran sudah menjadi anjuran dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setelah fase ini terlewati diharapkan pembinaan ketahanan keluarga juga sangat penting untuk dijalankan agar dapat terciptanya keluarga sejahtera. Peran penyuluhan dan pergerakan keluarga berencana mengedukasi masyarakat karna TFR (total fertility rate) Mataram 1,9 yang sangat rendah sehingga LPP Kota mataram jadi meningkat.

Di Kota Mataram, kebijakan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan yaitu mengatur kelahiran melalui program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) agar terkendali jumlah kelahiran dalam menekan laju penduduk, selain mengatur jumlah kelahiran mengatur jarak anak, mengatur kehamilan pengendalian penduduk juga meningkatkan kualitas SDM. Dalam bidang K3 (Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga) juga memuat program dengan cara sosialisasi bagaimana cara mengasuh anak/balita secara maksimal dari segi fisik, psikologis dan mental, yang membantu meningkatkan kualitas SDM. Program yang dijalankan oleh bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga yaitu:

1. Mensosialisasikan dan mendiseminasikan kebijakan dan strategi program PK3.

2. Mengembangkan materi dan media program PK3 sesuai dengan kondisi wilayah.
3. Melakukan advokasi dan KIE program PK3 kepada stakeholder, mitra kerja, keluarga, dan masyarakat.
4. Meningkatkan jejaring kerja dengan stakeholder dan mitra kerja dalam program PK3.
5. Mengelola data dan informasi program PK3 yang akurat dan terkini.
6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana.
7. Menumbuhkembangkan kelompok Bina Ketahanan Keluarga
8. Menumbuhkembangkan program GenRe (Generasi Berencana) dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja
9. Menumbuhkembangkan kelompok usaha ekonomi produktif bagi keluarga
10. Meningkatkan pendampingan dalam usaha ekonomi produktif
11. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola dan pelatih program PK3
12. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) melalui berbagai media

Dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berperan dalam jumlah dan kualitas dengan jumlah yang ditekan dan kualitas yang baik agar dapat meminimalisir jumlah penduduk selain itu alat kontrasepsi juga dapat membantu menekan laju penduduk.

Dalam hal ini bidang Keluarga Berencana juga melakukan pelayanan sosialisasi masalah KB melalui mobil pelayanan. Mobil pelayanan ini digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat serta program lainnya yang mencakup:

1. Lomba-lomba di bidang Keluarga Berencana
2. Pembinaan Petugas Lini Lapangan
3. Pertemuan Pokja Kampung KB
4. Pertemuan Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB
5. Lokakarya Mini Tingkat Desa/Kecamatan Kampung KB

c. Analisis The Integrated or Holistic Strategy

Program kegiatan Pembinaan Kader Keluarga Berencana yang ada di Kota Mataram sebanyak 806 orang yang berada di 6 Kecamatan, 50 Kelurahan dan 325 Lingkungan, para kader ini pada dasarnya menjadi petugas dilapangan (lingkungan) yang diberdayakan oleh Dinas PP dan KB Kota Mataram dengan SK Walikota Mataram No. 574/II/2018, tanggal 15 Februari 2018. Kader ini diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan

Pogram Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kota Mataram, yang memiliki tugas antara lain:

1. Melakukan Kegiatan Pendataan dan Pemutahiran data keluarga melalui kunjungan dari rumah ke rumah keluarga dilingkungan/wilayah binaannya.
2. Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh Keluarga Berencana, kepala lingkungan dan ketua RT setempat tentang kegiatan pendataan dan pemutahiran data keluarga serta program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Melakukan kegiatan motivasi, konseling dan pembinaan terhadap calon peserta KB maupun peserta KB dilingkungan/wilayah binaannya yang didampingi oleh penyuluh KB.
4. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB dilingkungan/wilayah binaannya.

Pembinaan terhadap Kader KB se Kota Mataram dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya untuk menginformasikan program dan kegiatan KKBPK oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram, yang dalam hal ini sebagai pelaksana program dan kegiatan dimaksud adalah Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan (Bidang P4) bersama dengan bidang yang lainnya.

Faktor Penghambat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Mataram:

- a. Menurunnya jumlah tenaga lapangan KB (rata-rata seorang PLKB/PKB membina 2 kelurahan)
- b. Semakin menurunnya jumlah dan kualitas SDM.
- c. Dari segi imigrasi bertambahnya penduduk sementara itu luas lahan permukiman semakin menyempit.
- d. Susahnya menjalankan program KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) karna masih banyak daerah terpencil.
- e. Pendanaan yang masih kurang dalam menjalankan program-program yang ada
- f. Sarana dan prasarana belum memadai yang berdampak buruk terhadap kesehatan lingkungan seperti meningkatnya angka kesakitan dan bahkan angka kematian bayi.

- g. Kurangnya aparatur sipil negara di bidang KB sehingga pelaksanaan program kebijakan dibidang pertumbuhan penduduk melalui KB kurang berjalan dengan maksimal.
- h. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk karena masih rendahnya sumber daya manusia.
- i. Dukungan infrastruktur, sarana pendukung berupa transportasi dan lainnya belum menunjang pelaksanaan program.

Faktor Pendorong Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Mataram.

- a. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, penyelenggaraan Perkembangan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
- b. Peraturan Walikota Mataram No. 40 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kota Mataram.
- c. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan program Keluarga Berencana melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019, yang dijabarkan didalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 2015-2019. Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan program KB di Kota Mataram.

Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Mataram yaitu:

- a. Analisis The Growth Strategy, Program yang dilakukan yaitu kegiatan Pembentukan dan Peresmian Kampung Keluarga Berencana
- b. Analisis The Welfare Strategy, Program yang dilakukan yaitu menumbuhkan serta

meningkatkan kepedulian masyarakat dalam rangka penyuluhan dan pergerakan keluarga Berencana dan melakukan pelayanan menggunakan mobil pelayanan KB

- c. Analisis The Responsitive Strategy, Program yang dilakukan yaitu sosialisasi pergerakan masyarakat peduli KB berkualitas
- d. Analisis The Integrated and Holistic Strategy, Program yang dilakukan yaitu kegiatan Pembinaan Kader KB se Kota Mataram

Jadi, dari 4 strategi diatas maka yang sangat relevan untuk laju pertumbuhan penduduk yaitu analisis the Growth Strategy.

Faktor pendukung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Mataram yaitu dengan adanya undang-undang dan peraturan walikota mataram yang bisa menjadi pendorong dalam berjalannya setiap program yang telah dibuat oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sedangkan faktor penghambatnya yaitu dengan banyaknya masalah dan hal-hal yang bisa menghambat kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk kota mataram.

Saran

1. Perbaiki Sumberdaya manusia tentu harus meningkatkan efisiensi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelayanan KB maka perlu adanya dukungan positif dari para pegawai dibidangnya untuk memberikan penyuluhan dan memberikan pemahaman akan pentingnya penggunaan KB bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Untuk meningkatkan efisien maka perlu penambahan sarana dan prasarana, rekrutmen jumlah tenaga di lapangan menjadi 50 dan peningkatan kesejahteraan pegawai agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik.
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebaiknya meningkatkan peran para tokoh masyarakat, tokoh agama, para dokter dan perawat untuk memberikan pemahaman yang baik bagi warga masyarakat demi terlaksanannya kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk demi kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Barclay, George W. 1984. *Teknik Analisa Data Kependudukan*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- [2] David, Fred R. 2008. *Strategic Management: Management Strategis Konsep*. 12 edition. Jakarta: Salemba Empat
- [3] Faqih, Achmad. 2002. *Kependudukan-Teori Fakta dan Masalah*. Yogyakarta: Dee Publish.
- [4] Irianto, Agus and Friyatmi. 2016. *Demografi dan Kependudukan*. Jakarta: Kencana.
- [5] Malthus, et al. 2007. *Kependudukan Dilema dan Solusi*. Bandung: Nuansa.
- [6] Moleong, L, J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [7] Prawiro, Ruslan H. 1983. *Kependudukan Teori Fakta dan Masalah*. Bandung: Alumni.
- [8] Saryono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta.
- [9] Simanjuntak, P, N.H. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- [10] Stoner, Freeman and Gilbert J.R. 1995. *Manajemen*. Jakarta: Mitra Utama.
- [11] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [12] _____. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- [13] _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Cetakan Ke-20. Bandung: Alfabeta.
- [4] Mataram Kota “Proyeksi jumlah penduduk kota mataram tahun 2011-2020” dari [<https://mataramkota.bps.go.id/>] Di akses pada tanggal 25 November 2018.
- [5] Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 72/PER/B5/2011 tentang organisasi dan tata kerja BKKBN.
- [6] Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- [7] Syawal, R. 2012. Analisis peran pemerintah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk (studi tentang peranan dan fungsi BKBPP dalam meminimalisir pertumbuhan penduduk di Kec. Enrekang Kab. Enrekang). *Jurnal ilmu Pemerintahan*. [<https://gudangmakalah.blogspot.com/2012/10/skripsi-analisis-peran-pemerintah-dalam.html>] Diakses pada tanggal 18 desember 2018.
- [8] Tatuhe, S., Laloma. A., and Pesoth, W, F. 2016. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Suatu Studi di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Administrasi Publik*.
- [9] [<https://www.google.co.id/url?q=https://media.neliti.com/media/publications/1506-ID-peranan-pemerintah-daerah-dalam-pengendalian-pertumbuhan-penduduk-suatu-studi-di.pdf>]. Di akses pada tanggal 25 Oktober 2018.
- [10] Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- [11] Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

Artikel/Modul/Diklat

- [1] Intansaf 2018 “Permasalahan Kependudukan Di Indonesia” [<https://intansaf.wordpress.com>] Di akses pada tanggal 12 Desember 2018.
- [2] Suara NTB. 2018 “BKKBN Targetkan Tahun 2025 Laju Pertumbuhan Penduduk Mulai Seimbang” [<https://www.suarantb.com/gaya.hidup/kesehatan/2017/10/247580>] Di akses pada tanggal 25 November 2018.
- [3] Kawulur, A.,Dengo,S.,and Rompas, S.P.I. 2015. Peran BKKBN dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Suatu Studi di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal administrasi publik*. [<https://www.google.co.id/url?q=https://www.neliti.com/publications/1256/peranan-bkkbn-dalam-pembangunan-kesejahteraan-sosial-suatu-studi-di-badan-keluar&>]. Di akses pada tanggal 25 Oktober 2018.